

**Pelaksanaan *Sister Village* dalam Penanggulangan
Bencana Erupsi Gunung Merapi pada Tahun 2021
di Kabupaten Magelang**

Amirudin Maula M *), Yuwanto **)

Email : amirudinmaula@gmail.com, yuwantosaja@yahoo.com

**Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro**
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <https://fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Implementasi pelayanan publik dalam kebencanaan oleh pemerintah hingga sekarang masih memiliki masalah yang ada mengingat pemerintah mempunyai fungsi dan tugas memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dilapangan. Modifikasi sistem kebencanaan perlu dilakukan sebelumnya pelaksanaan suatu program yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan yang masyarakat harapkan. Hal ini tentunya perlu melalui proses awal dari tahapan modifikasi system kebencanaan sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selaras dengan hal tersebut, penelitian ini membahas dan menganalisis implementasi *sister village* di Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menjelaskan menggunakan teori Implementasi Kebijakan oleh George C. Edward III.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan *sister village* dilihat dari indikator George C. Edward III ini sudah dilaksanakan secara baik. Tujuan dari implementasi *sister village* sudah dicapai dengan baik bisa dilihat dari bencana erupsi gunung merapi pada tahun 2021 yang lebih tertata dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi. Adanya faktor pendukung dan penghambat menjadikan implementasi kebijakan *sister village* perlu adanya pembaharuan dari tahun ke tahun untuk optimalisasi sistem kebencanaan yang lebih modern.

Kata Kunci: *Sister Village*, Penanggulangan Bencana, Implementasi Kebijakan dan Kabupaten Magelang

**Implementation of Sister Village in
Disaster Management of Mount Merapi Eruption in 2021
in Magelang District**

Amirudin Maula M *) , Yuwanto **)

Email : amirudinmaula@gmail.com, yuwantosaja@yahoo.com

*Departement of Politics and Government
Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <https://fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id*

ABSTRACT

The implementation of public services in disaster by the government until now still has existing problems considering that the government has the function and task of providing public servants to the community according to the needs in the field. Modification of the disaster system needs to be done before the implementation of a program that will be implemented to achieve the goals that the community expects. This certainly needs to go through the initial process of the disaster system modification stage in accordance with existing field conditions. The establishment of the Magelang District Regional Disaster Management Agency is a mandate from Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management. In line with this, this research discusses and analyzes the implementation of sister villages in Magelang District. This research uses a qualitative research method that

Explains using the theory of Policy Implementation by George C. Edward III. Edward III. Overall, the results of the study concluded that the implementation of the sister village policy seen from the indicators of George C. Edward III's indicators have been implemented well. The objectives of sister village implementation have been achieved well, which can be seen from the Merapi volcanic eruption disaster in 2021 which is more organized in terms of communication, resources, disposition and bureaucracy. The existence of supporting and inhibiting factors makes the implementation of the sister village policy necessary for renewal from year to year to optimize the disaster system.

Keywords: Sister Village, Disaster Management, Policy Implementation and Magelang District

*) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**) Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

A. PENDAHULUAN

Kebencanaan di Indonesia masih mengalami dinamika kewenangan yang saling tumpang tindih didalam birokrasi. Implementasi pelayanan publik dalam kebencanaan oleh pemerintah hingga sekarang masih memiliki masalah yang ada mengingat pemerintah mempunyai fungsi dan tugas memberikan pelayan publik kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Karakteristik ekonomi sosial masyarakat lereng Gunung Merapi memiliki kepadatan penduduk yang tinggi mencapai 115.834 tinggal dikawasan rawan bencana. Pertumbuhan penduduk ini disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan (kesuburan tanah dan ketersediaan air) dan faktor sosial ekonomi (pembangunan dari segi infrastruktur, pengembangan wisata, telekomunikasi dan sistem air tawar.)

Adanya pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana. Penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang. Sebelum terbentuknya BPBD tugas dan fungsi dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana khususnya oleh Sub Bidang Penyelamatan dan Rehabilitasi Bidang Penanggulangan Bencana. Sebagai tindak lanjut penetapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011, telah dilantik pejabat struktural pada BPBD tanggal 22 Oktober 2011 dan mulai tanggal tersebut.

Modifikasi sistem kebencanaan perlu dilakukan sebelumnya untuk pelaksanaan suatu program yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan yang masyarakat harapkan. Hal ini tentunya perlu melalui proses awal dari tahapan modifikasi system kebencanaan sesuai dengan kondisi lapangan yang ada.

Keberadaan sistem sebaiknya ditinjau kembali untuk memonitor relevansinya. Jika hasil pelaksanaan dilapangan menunjukkan adanya pergeseran sistem dari tujuan semula, maka diperlukan perbaikan dan atau perluasan sistem kebencanaan (*system*

disaster expansion). Dengan adanya langkah modifikasi system kebencanaan diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas implementasi system kebencanaan untuk hal yang lain terkait nantinya ketika terjadi suatu jenis bencana yang lain.

Dengan kondisi latar belakang permasalahan seperti itu pemerintah daerah khususnya Kabupaten Magelang melalui BPBD Kabupaten Magelang membuat program dengan nama *Sister Village* atau masyarakat sekitar menyebutnya dengan “Paseso” (Paseduluran Deso). Sistem *sister village* merupakan hasil dari modifikasi model baru *disaster management* yang dibuat pada tanggal 22 Juli 2013 oleh BPBD Kabupaten Magelang dengan membuat jalinan kerja sama antara desa kawasan rawan bencana dengan desa yang jauh dari ancaman bencana gunung meletus pada tahun 2021.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi *Sister Village* dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2021?

Apa Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan *Sister Village* dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Merapi pada tahun 2021?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk Mengidentifikasi implementasi *sister village* yang terjadi pada BPBD Kabupaten Magelang dan Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang terjadi pada implementasi *sister village* di BPBD Kabupaten Magelang.

D. KERANGKA TEORI

1. Implementasi Kebijakan

Pendekatan yang digunakan untuk menggabungkan para peneliti Generasi II yang menggunakan logika cara berfikir dari ‘atas’ kemudian melakukan klasifikasi ‘ke bawah’ untuk melihat tingkat keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Implementasi kebijakan publik menurut George Edward III terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan

antara lain yaitu faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

2. *Disaster Manajemen*

Pengelolaan bencana didefinisikan sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis *preventif* (pencegahan), proses mitigasi (pengurangan), persiapan, respon darurat dan pemulihan. Menurut Neil Grigg fase utama dan fungsi pengelolaan manajemen secara umum termasuk dalam manajemen/pengelolaan bencana, meliputi tahapan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, penganggaran dan keuangan.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dengan metode menggunakan kualitatif. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian isu tertentu secara mendalam dan terperinci untuk mendapatkan dan mengkaji fenomena

sosial kemasyarakatan terkait program yang dijalankan. Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini adalah Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Magelang. Informan dalam penelitian ini adalah Ibu Muflichah Roycchani selaku Kepala Sekretariat BPBD Kabupaten Magelang, Bapak Muhammad Faiq S.IP., M.Si. sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bapak Kristian Hadiwijaya S.T sebagai Kepala Pusat Data dan Logistik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi yang kemudian hasilnya dianalisis menggabungkan hasil wawancara beserta sumber lain seperti dokumen maupun berita.

F. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi *Sister Village* dalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Merapi pada Tahun 2021

a) Pra Bencana

Penentuan kejadian pra bencana didasarkan pada masukan para ahli bidang Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan dan Geologi (BPPTKG) di Yogyakarta.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Magelang, peneliti menyimpulkan bahwa penentuan kejadian tidak hanya ada pada satu pihak tetapi adanya indikator-indikator untuk menentukan status pada kejadian pra bencana erupsi gunung Merapi pada tahun 2021. Selain menentukan kejadian bencana, dari BPBD Kabupaten Magelang juga memberikan program terkait kejadian pra bencana. Tahap pra bencana dapat dilakukan secara struktural maupun kultural. Dari segi struktural sendiri, usaha yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan bencana adalah rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Sedangkan, kultural yaitu dengan melakukan peningkatan pengetahuan dan memperkuat mental masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan disekitar daerah bencana.

b) Bencana

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan

Kesiapsagaan BPBD Kabupaten Magelang, peneliti menyimpulkan bahwa program pada saat terjadinya bencana yaitu dengan mengungsikan semua seluruh masyarakat desa terdampak menuju ke desa penyangga yang dimana sebelumnya sudah adanya kesepakatan antara kedua desa tersebut untuk dijadikan tempat evakuasi. Masyarakat juga dihimbau untuk menggunakan masker dan kacamata pelindung dan selalu memperhatikan arahan dari pihak berwenang selama proses evakuasi berlangsung. Hal ini menunjukkan bagaimana efektivitas keberjalannya sister village sebagai inovasi kebijakan dalam hal menangani bencana erupsi gunung meletus yang ada di Kabupaten Magelang.

c) Pasca Bencana

Pada tahapan pasca bencana ini, BPBD Kabupaten Magelang dalam situasi pasca bencana, sering terjadi

kesimpang-siuran data dan informasi warga terdampak maupun kerusakan, sehingga mempersulit pengambilan kebijakan penanganan darurat. Dalam situasi kedaruratan, waktu merupakan faktor utama dalam melatarbelakangi seluruh kegiatan respon darurat. Pelaksanaan kebijakan dan strategi harus mendasarkan pada prinsip-prinsip kedaruratan dimana tujuan rencana operasi dimaksudkan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan.

d) Komunikasi dalam Implementasi *Sister Village*

Dalam melakukan implementasi kebijakan *Sister Village*, perlu adanya komunikasi yang baik antar OPD untuk bersama-sama membangun implementasi tersebut, agar

implementasi yang dijalankan akan berjalan dengan baik. Berdasarkan temuan oleh peneliti bahwa implementasi *Sister Village* pada awalnya, komunikasi yang dibangun oleh internal pemerintah daerah dalam hal ini BPBD Kabupaten Magelang sudah sangat baik dengan melakukan inisiatif pembentukan system kebencanaan daerah yang kemudian langsung dilaporkan ketingkat nasional untuk dapat langsung mensosialisasikan program baru yang diciptakan oleh BPBD Kabupaten Magelang pada awal pembentukan. Selain komunikasi tingkat internal pemerintahan dalam hal ini BPBD Kabupaten Magelang, juga melakukan komunikasi dengan pihak eksternal yaitu stakeholder terkait yaitu CSR (*Corporate Sosial Responcibility*), organisasi

masyarakat desa dan instansi lainnya seperti TNI, POLRI, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perternakan, Dinas Pekerjaan Umum, Satpol PP, dan Rumah Sakit Umum Daerah.

e) Sumber Daya

Berdasarkan temuan peneliti menyimpulkan bahwa faktor keberhasilan sistem kebencanaan *sister village* disebabkan oleh tenaga ahli dibidangnya diisi oleh orang-orang yang sangat memahami jabatan yang ada. Melihat, perbaikan system kebencanaan ini mengalami peningkatan secara signifikan melalui inovasi kebijakan dengan memanfaatkan sumber daya internal yang ada. Selain sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan Sister Village, peneliti

juga menjelaskan terkait dengan sumber daya infrastruktur baik sarana dan prasarana yang ada di BPBD Kabupaten Magelang

f) Disposisi

Berdasarkan temuan peneliti bahwa bahwa sudah ada regulasi yang terikat pada saat pembentukan BPBD Kabupaten Magelang dengan tugas dan wewenang sesuai dengan bidangnya. Sehingga ini menjadi langkah awal yang baik sebagai bentuk jawaban atas tantangan dari Masyarakat desa yang terkena dampak bencana. Namun dalam implementasi *sister village* dari hal komunikasi sudah berjalan baik tetapi masih ada kendala dalam sumber daya infrastruktur sarana dan prasarana dalam keterbatasan anggaran yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau regulasi dalam implementasinya. Oleh

karena itu, masalah disposisi BPBD Kabupaten Magelang sudah teratasi karena komunikasi dari tingkat pusat dan daerah berjalan dengan baik sehingga melahirkan regulasi yang jelas dan tidak ada tumpang tindih terhadap pelaksanaan dilapangan

g) Birokrasi

Dalam proses implementasinya, memang faktor perubahan struktur birokrasi sangat mempengaruhi dalam setiap proses implementasi kebijakan yang dijalankan, karena adanya pergantian struktur birokrasi yang pada saat system kebencanaan ini mulai peluncuran yaitu pada tahun 2013 sampai dengan saat ini BPBD Kabupaten Magelang perubahan struktur birokrasi sebanyak tiga kali pergantian kepengurusan. Sehingga, dengan adanya perubahan struktur birokrasi otomatis dari sisi prosedur, sistem

kerja, pembagian kerja, wewenang dan kordinasi antar instansi juga berubah mengikuti arahan dari Kepala Pelaksana yang baru, dan mempunyai wewenang penuh dalam keberjalanan suatu organisasi untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang lebih baik lagi sesuai dengan RPJMD, Visi-misi Kabupaten Magelang, dan juga Tugas, pokok, dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah itu sendiri.

2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi *sister village* di BPBD Kabupaten Magelang

a) Faktor Pendukung

1. Adanya disposisi sebagai keberlanjutan manfaat yang dapat diterima oleh masyarakat

2. Adanya jalinan komunikasi yang baik antara BPBD Kabupaten Magelang dari tingkat paling atas yaitu Pemerintah Kabupaten sampai tingkat paling bawah yaitu masyarakat desa

b) Faktor Penghambat

1. Minimnya sumber daya anggaran yang diperoleh dari BPBD Kabupaten Magelang itu sendiri.
2. Tidak adanya keberlanjutan program jika ada pergantian kepala bidang di BPBD Kabupaten Magelang

G. KESIMPULAN

Implementasi pada system kebencanaan Sister Village, dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil penelitian dilapangan terdapat beberapa masalah, adapun empat variable yang melatarbelakangi

berjalannya implementasi Sister Village. yaitu Pertama adalah Komunikasi dalam implementasi yang sudah baik antar perangkat daerah sehingga prosesnya dari tahun ke tahun sudah semakin membaik dibandingkan dengan tiga tahun awal pada saat pembentukan Sister Village, Kedua pada Sumberdaya manusia, untuk sumber daya manusia pada BPBD Kabupaten Magelang ini cukup banyak namun adanya keterbatasan anggaran program dari pemerintah daerah sangat berpengaruh pada penyediaan alokasi sarana dan prasarana infrastruktur berikutnya, Ketiga adalah Disposisi, dengan adanya regulasi seperti Perda, Perbup, Keppres, maupun Instruksi Bupati yang melatarbelakangi penerapan Sister Village, menjadikan peran OPD dalam

penerapan system kebencanaan ini dapat melakukan tugas dan fungsinya masing-masing serta adanya regulasi yang terikat menunjuk untuk OPD melakukan inovasi kebijakan. Keempat adalah Struktur birokrasi, terjadinya pergantian struktur birokrasi menjadikan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Pelaksana sebelumnya berubah seiring mengikuti kebijakan baru dari pimpinan Kepala Pelaksana yang baru. Sehingga dari adanya pergantian struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap program yang diterapkan.

H. SARAN

1. Dalam meningkatkan sumber daya infrastruktur tentunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang dapat melakukan

kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan-pengembangan sumber daya infrastruktur.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang untuk memperkenalkan sistem kebencanaan Sister Village memanfaatkan sosialisasi melalui buku saku panduan untuk memperkenalkan Sister Village dalam layanan publik yang satu pintu kepada masyarakat

I. DAFTAR PUSTAKA

Estuning Tyas dkk, Sister Village ; Strategi Alternatif Mitigasi Bencana Gunung Api (Yogyakarta:UGM Press 2019)
Nurjanah, R. Sugiharto, Dede Kuswanda, Siswanto

BP dan Adikoesoemo.
Manajemen Bencana
(Malang:Alfabeta,2013)

Widodo, Joko. 2009. Analisis
Kebijakan Publik Konsep dan
Aplikasi Analisis Proses
Kebijakan Publik. Malang:
Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik
Teori dan Proses Edisi Revisi.
Yogyakarta: Media Pressindo

Dokumen:

Peraturan Daerah No.18 Tahun 2016
tentang rincian kegiatan dalam tahapan
penanggulangan bencana Kabupaten
Magelang